

DILEMA AUSTRALIA: KONTESTASI HEGEMONI ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN CHINA DI KAWASAN INDO-PASIFIK

Muhammad Raka Abdillah Korompot¹, Darwis², Imam Fadhil Nugraha³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 2024

Revised December 2024

Accepted December 2024

Available online Oktober 2024

Korespondensi: Email :

¹rakakorompot05@gmail.com

²darwis.hi@unhas.ac.id

³imamfadhil86@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Rivalitas hegemoni antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik menciptakan dinamika geopolitik yang kompleks, terutama dalam konteks teori realisme. Amerika Serikat berupaya mempertahankan dominasi melalui aliansi strategis seperti Australia, United Kingdom, United States (AUKUS), sementara China menantang posisi tersebut dengan modernisasi militer dan inisiatif ekonomi *Belt and Road Initiative* (BRI). Sebagai negara yang berada di antara dua kekuatan besar, Australia menghadapi dilema strategis dalam menjaga aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan ketergantungan ekonomi pada China. Untuk mengatasi tantangan ini, Australia menerapkan pendekatan multifaset

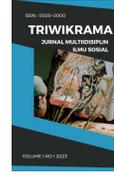
yang melibatkan penguatan kapabilitas militer, diversifikasi aliansi melalui *Quad*, serta diplomasi ekonomi dengan China. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana Australia mengelola perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, mendukung stabilitas regional, dan melindungi kepentingan nasionalnya dalam kerangka teori realisme.

Kata Kunci: Rivalitas, Australia, Amerika Serikat, China, Dilema.

PENDAHULUAN

Di dalam ilmu hubungan internasional kita mengetahui bahwa hubungan interaksi antara negara sangatlah dinamis dan mudah berubah-ubah. Beberapa diantaranya lebih mengedepankan cara-cara yang kooperatif dan kolaboratif. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya rezim internasional yang menjadi wadah kerja-sama antar negara terjadi. Baik dalam bidang ekonomi, budaya hingga militer. Namun, tak sedikit juga diantara negara-negara tadi yang lebih menyukai interaksi yang kompetitif bahkan tak jarang menjelma sebagai rivalitas. Rivalitas dalam hubungan internasional sendiri dapat terjadi antara negara-negara untuk mencapai hegemoni atau untuk mempertahankan pengaruhnya di suatu kawasan.

Contoh relevan mengenai rivalitas antar negara dapat kita lihat dari persaingan Amerika dan Uni Soviet semasa perang dingin terjadi. Perang Dingin sendiri adalah periode ketegangan politik dan militer antara Dunia Barat dan Dunia Komunis yang berlangsung dari tahun 1947 hingga 1991. Perang Dingin dilancarkan di bidang politik, ekonomi, dan propaganda dan hanya



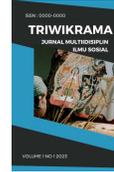
menggunakan senjata secara terbatas (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2024). Selama periode ini keduanya terlibat dalam persaingan yang ketat dalam berbagai bidang. Mulai dari perlombaan antariksa, penyebaran ideologi, hingga *Arm Race* yang membuat *security dilemma* terus meneror banyak negara. Rivalitas keduanya baru berhenti ketika Uni Soviet mengalami keruntuhan mendekati abad 21. Sehingga, membuat Amerika Serikat praktis menjadi satu-satunya negara adikuasa di dunia tanpa ada saingan hingga sekarang (Roren, 2024).

Namun Tiongkok dengan industri manufakturnya yang luar biasa kemudian muncul sebagai negara kuat yang sepertinya hendak merebut gelar Amerika Serikat tersebut. Kemunculan Tiongkok sebagai Kekuatan Baru yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok semenjak reformasi ekonomi Deng Xiaoping telah mendorong Tiongkok untuk melakukan modernisasi militer yang juga meningkatkan anggaran belanja militer Tiongkok (Winata et al., 2021) Persaingan antar keduanya pun tidak terelakkan. Keduanya sama-sama memiliki ambisi yang besar untuk menyebarkan dan memperkuat pengaruhnya di tataran global. Pada wilayah strategis seperti Indo-Pasifik, Amerika dan Tiongkok berlomba untuk menjadi pionir nomor satu bagi negara-negara yang ada di dalamnya. Hal ini wajar mengingat wilayah Indo-Pasifik adalah wilayah strategis bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dunia dan menjadi pusat perdagangan hampir setengah dari total perdagangan internasional (Vientiane, 2024).

Rivalitas Amerika dan Tiongkok ini nyatanya memberikan dampak yang signifikan bagi banyak negara Indo-Pasifik, termasuk Australia. Australia adalah salah satu negara dengan budaya paling multikultural di dunia, dan rumah bagi budaya tertua di dunia yang masih lestari. Masyarakat Pribumi Australia telah tinggal dan mengelola tanah ini selama lebih dari 60.000 tahun. Namun, perlakuan awal terhadap penduduk Pribumi Australia ditandai oleh konflik dan penganiayaan (Namok, n.d.).

Pasca Perang Dunia II, hubungan bilateral Australia dan Amerika Serikat telah terjalin cukup erat (Winata et al., 2021). Australia adalah sekutu, mitra, dan sahabat penting Amerika Serikat. Kedua negara telah memelihara hubungan yang kokoh dengan didukung oleh nilai-nilai demokrasi bersama, kepentingan bersama, dan kedekatan budaya. Keduanya telah melakukan berbagai kerjasama di banyak bidang dan menjadi mitra yang akrab. Australia-United States *Free Trade Area* (AUSFTA) dan Australia-United States-New Zealand (ANZUS) adalah contoh jalinan kerjasama kedua negara ini dalam hal ekonomi dan militer (U.S Department of state, 2023).

Di sisi lain, Australia juga telah menjalin kerjasama dengan Tiongkok, baik dalam bidang ekonomi maupun pariwisata. Australia dan Tiongkok telah menikmati hubungan perdagangan yang kuat selama lebih dari 15 tahun, dengan Tiongkok secara konsisten menempati peringkat sebagai mitra dagang terbesar Australia, dan menyumbang 27 persen dari total perdagangan barang dan jasa Australia pada tahun 2023. Tiongkok juga merupakan sumber pariwisata yang penting bagi Australia. Pada tahun 2023, Australia menyambut lebih dari 550.000 wisatawan Tiongkok, termasuk gelombang masuk yang signifikan sebanyak 66.000 pada bulan Desember



saja (Interesse & Yi Wu, 2024). Arus wisatawan yang kuat ini mencerminkan meningkatnya daya tarik Australia sebagai tujuan wisata. Fakta ini memberi kita wawasan bahwa peran Tiongkok bagi Australia tentulah tidak mudah digantikan.

Melihat hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok yang sedang berkompetisi memperkuat pengaruh masing-masing negara di wilayah strategis Indo-Pasifik. Australia dihadapkan pada dilema yang sulit, dikarenakan Amerika Serikat sejak lama telah menjadi sekutu Australia yang dahulu porak poranda sehabis perang. Sedangkan pertumbuhan dan kebangkitan ekonomi Tiongkok membuat Australia mendapatkan mitra dagang yang menguntungkan selama beberapa dekade terakhir. Bergabungnya Australia ke dalam aliansi AUKUS tentu membuat Tiongkok mempertanyakan kelanjutan hubungan dagang antara keduanya.

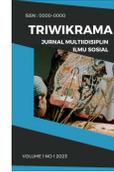
Sejak pembentukan aliansi AUKUS pada bulan September 2021 lalu, situasi keamanan regional di Asia Pasifik mengalami peningkatan tensi militer. Disepakatinya AUKUS menjadikan Australia dapat mengembangkan kekuatan nuklirnya lewat pembangunan kapal selam bersenjata nuklir (Indrawan, 2022). Hal ini tentu membuat Beijing meradang dan berakibat pada banyak negara khususnya di wilayah Asia Pasifik yang mempertanyakan komitmen Australia terkait *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT). Melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyatakan berkomitmen pada tujuan dunia tanpa senjata nuklir (Australia Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.).

Berkaitan dengan hal di atas, tulisan ini akan membahas bagaimana strategi Australia sebagai negara yang terjebak dalam rivalitas antara dua blok yang sedang perang urat saraf demi mempertahankan hegemoni di kawasan yang strategis. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menambah wawasan terkait bagaimana kecenderungan kebijakan yang diambil oleh sebuah negara yang berada dalam pusaran kepentingan negara-negara lain. Sehingga ke depannya para pengamat HI dapat memprediksi variabel apa saja yang akan terjadi jika kasus serupa kembali berulang.

METODE

Tulisan ini akan menggunakan metode penelitian dalam bentuk deskriptif dan jenis data yang akan digunakan untuk mendukung argumentasi penulis di dalam tulisan sederhana ini adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, web berita dan informasi lain yang beredar di internet. Pada dasarnya, sumber sekunder bentuknya bisa tertulis, lisan, maupun audio visual yang tidak sezaman dengan peristiwanya. Salah satu contoh sumber sekunder, yakni hasil liputan koran oleh wartawan yang hadir langsung dalam suatu kejadian. Selain koran, ulasan buku, artikel ilmiah, ulasan literatur, serta biografi juga termasuk contoh sumber sekunder (Putri, 2024). Sehingga penelitian ini akan memiliki ciri produk riset kepustakaan (*library research*) yang lekat.

Mengingat informasi yang disajikan akan dijabarkan dalam bentuk kualitatif yang muncul dari pemahaman dan interpretasi penulis dari fenomena rivalitas yang sedang dikaji. Hal ini didasarkan perlunya penjelasan yang lebih menyeluruh terkait fenomena yang akan diusut



dalam paradigma realisme dan konsep *balance of power* yang cukup umum dibahas. Metode kualitatif sendiri lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Metode kualitatif juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (*what*)”, “bagaimana (*how*)”, atau “mengapa (*why*)” atas suatu fenomena (Wibisono, 2019).

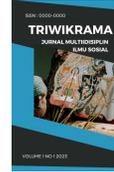
LITERATURE REVIEW

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok

Bila kita pahami dengan seksama, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejatinya terjadi akibat munculnya Tiongkok sebagai penantang baru dalam arena hubungan internasional melawan Amerika Serikat. Ditambah lagi, kebangkitan Tiongkok juga diiringi dengan berbagai kebijakan luar negeri yang bagi banyak negara, termasuk negara kekuatan besar, dirasa agresif dan impulsif baik secara militer maupun ekonomi (Winata dkk, 2021). Hal ini menjadikan langkah-langkah yang diambil Tiongkok mengganggu posisi Amerika Serikat yang telah menjadi satu-satunya negara Adikuasa di dunia setelah Uni Soviet runtuh.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dengan pesat membuat Amerika kian meradang. Amerika Serikat tentu memandang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan luar negeri Tiongkok yang agresif sebagai sebuah ancaman yang perlu diwaspadai. Sebagaimana kita ketahui dalam paradigma realisme yang mengutamakan asumsi tidak percaya dan skeptisme kepada pihak lain. Amerika Serikat lewat berbagai macam kebijakan dan kerjasama internasionalnya terus berupaya untuk membendung pengaruh Tiongkok yang kian menguat di wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Seperti kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan *Pivot to Asia* di masa Barack Obama dan *Free and Open Indo Pacific* pada masa Donald Trump merupakan contoh implementasi respon Amerika Serikat yang dapat kita pelajari.

Terjadinya persaingan yang cukup ketat antara dua negara ini kemudian memberi efek yang signifikan pada negara-negara menengah yang ada di kawasan. Pergolakan kepentingan yang memanas membuat terjadinya instabilitas keamanan di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang saat ini masih menjadi perebutan negara-negara di wilayah tersebut. Perang dagang yang gila-gilaan dalam aspek ekonomi berimbas pada proteksionisme kepada Thailand, Malaysia, dan Vietnam dan depresiasi uang kepada Indonesia dimana turunnya 1,6% nilai pasar finansial. Mengingat negara-negara ini menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Australia adalah contoh negara yang terdampak rivalitas dua negara ini. Dikarenakan Australia menjadikan keduanya Amerika Serikat sebagai sekutu dan mitra strategis di bidang militer dan keamanan. Sedangkan Tiongkok merupakan mitra Australia yang berperan penting dalam tatanan ekonominya. Kondisi ini mendorong Australia untuk mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada kawasan Asia-Pasifik bernama *Australian White Paper 2017*.



Australian White Paper 2017.

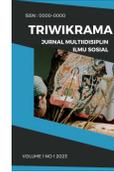
Melihat kondisi di kawasan yang kian mengkhawatirkan, Australia lewat *Australian White Paper 2017* mencoba untuk kembali fokus menciptakan wilayah Asia Pasifik yang damai, aman dan makmur (Winata dkk., 2021). Upaya ini tempuh dengan melakukan penenangan atas proteksionisme dan ajakan kepada banyak negara di kawasan Asia Pasifik untuk membuka pintu perdagangannya sebebass mungkin. Bagi internal Australia sendiri, kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis Australia mempersiapkan diri dalam menghadapi tatanan global yang kian dinamis seiring kebangkitan Tiongkok sebagai penantang baru Amerika Serikat. Hal ini menjadi alasan mengapa di dalam kebijakan *Australian White Paper 2017* Australia menaruh perhatian untuk memperkuat kekuatan domestik dan internasionalnya. Dalam mewujudkan cita-cita kawasan Asia Pasifik yang damai dan makmur. Australia berupaya untuk mengambil celah menggandeng Amerika Serikat dan Tiongkok secara bersamaan. Amerika dalam hal keamanan dan stabilitas kawasan, sedangkan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan perdagangan bebas. Namun tentu saja hal ini sulit dilakukan. Dalam perspektif realisme klasik, kedua negara besar ini akan menganggap satu sama lain sebagai ancaman yang tidak dapat diajak berkompromi.

PEMBAHASAN

1. Kontestasi Hegemoni di Indo-Pasifik: Perspektif Realisme

Dalam teori realisme, hubungan internasional dilihat sebagai perjuangan kekuatan di mana negara heterogen mengejar kepentingan nasional mereka dengan fokus pada *power* (kekuatan). Pada konteks ini, Amerika Serikat dan China berkompetisi untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Indo-Pasifik. Konsep dari "*balance of power*" menggambarkan upaya negara-negara untuk mengimbangi kekuatan negara lain agar tidak ada satu negara pun yang menjadi *hegemon*. Amerika Serikat telah lama mendominasi kawasan ini dengan aliansi militernya dan kekuatan ekonomi, sedangkan China berdasarkan pertumbuhan cepatnya berusaha untuk menyaingi dominasi tersebut dengan meningkatkan kekuatan militernya dan membangun jaringan pengaruh ekonomi melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Australia, yang berada di antara dua kekuatan besar ini, dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kebijakannya demi memaksimalkan keamanannya dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. (Bhisa et al., 2024)

Secara spesifik, realistis menilai perilaku negara-negara seperti Australia dalam skenario semacam ini sebagai tindakan yang rasional. Australia wajib memperhitungkan kekuatan kedua belah pihak serta ancaman dan peluang yang ditimbulkan dari rivalitas yang berlangsung. Pada saat yang sama, Australia harus mengelola hubungannya dengan kedua negara raksasa tanpa memprovokasi konflik atau kerugian yang besar. Dengan situasi yang demikian, Australia dianggap negara yang harus senantiasa waspada terhadap pergeseran kekuatan yang akan berdampak langsung pada keamanannya. Dalam tatanan internasional yang *anarchic* (tanpa otoritas pusat), kehadiran dua kekuatan besar ini merupakan kenyataan yang tak terhindarkan dan strategi "*balance of power*" adalah instrumen utama bagi Australia untuk beroperasi di



lingkungan ini. Pentingnya Indo-Pasifik terletak pada nilai strategis dan ekonominya, menjadikannya medan sengit persaingan antara Amerika Serikat dan China. Australia tidak memiliki pilihan lain selain terlibat aktif dalam konteks ini (Bhisa et al., 2024).

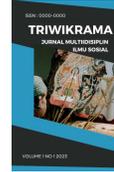
Yang menarik adalah bagaimana Australia menjalankan strategi *double security*. Di satu sisi, Australia memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat seperti yang terlihat dalam Kemitraan Pertahanan AUKUS. Di sisi lain, mempertahankan hubungan ekonomi dengan China sebagai mitra dagang terbesar. Gagasan ini menyoroti betapa kompleks dan menantanginya posisi Australia dalam menghadapi kontestasi hegemoni di kawasan ini. (Indrawan, 2022).

Realisme adalah salah satu teori utama dalam studi hubungan internasional yang menekankan aspek kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai faktor utama dalam perilaku negara. Teori ini berakar dari pemikiran para filsuf klasik seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes, yang memandang dunia sebagai arena di mana negara-negara bersaing untuk kekuasaan dan bertahan hidup. Realisme berasumsi bahwa anarki, atau ketiadaan otoritas supranasional yang mengatur hubungan internasional, memaksa negara-negara untuk bersikap egoistis dan fokus pada kepentingan diri mereka sendiri. Dengan demikian, negara adalah aktor utama, dan interaksi antar negara didasarkan pada kalkulasi tentang kekuatan dan strategi. (Indrawan, 2022).

Para penganut realisme berpendapat bahwa keamanan adalah prioritas utama bagi setiap negara, sehingga mereka selalu berupaya memperkuat kemampuan militer dan aliansi strategis guna menghadapi potensi ancaman dari negara lain. Sumber daya yang terbatas sering kali menyebabkan konflik, dan setiap negara harus siap untuk menggunakan kekuatan untuk melindungi kepentingannya. Faktor utama yang mendorong tindakan negara dalam teori realisme adalah ketidakpercayaan mendasar terhadap niat negara lain, sehingga diplomasi cenderung bersifat instrumental dan sering kali disertai dengan pertunjukan kekuatan. (Indrawan, 2022).

Namun, realisme juga mengakui bahwa ada berbagai bentuk kekuatan yang digunakan oleh negara, termasuk ekonomi dan diplomatik, meskipun militerisme sering dianggap sebagai pilar utama. Institusi internasional dan aturan tidak dapat diandalkan sebagai pelindung keamanan dan stabilitas karena mereka dianggap hanya mencerminkan kepentingan negara-negara yang kuat. Oleh karena itu, negara harus selalu waspada dan mandiri dalam memastikan kelangsungan hidup dan kemakmurannya (Sesarianto, 2023).

Teori realisme dapat dipandang sebagai pisau bedah paling tajam untuk memahami fenomena rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Rivalitas ini dapat dilihat melalui persaingan militer, ekonomi, dan politik yang terus meningkat. Amerika Serikat, sebagai hegemon global selama dekade terakhir, memandang Tiongkok sebagai ancaman potensial terhadap status quo dan supremasi globalnya. Tiongkok, di sisi lain, berupaya memperkuat posisinya di dunia dengan membangun militer yang lebih kuat dan mengekspansi pengaruh ekonominya melalui inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* (BRI). (Sesarianto, 2023).



Dalam konteks persaingan militer, kedua negara telah meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara signifikan. Amerika Serikat terus mengembangkan teknologi militer canggih dan memperkuat aliansi dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik sebagai upaya *containment*. Tiongkok, di sisi lain, juga memperkuat kekuatannya, termasuk pembangunan armada angkatan laut yang besar dan teknologi perang canggih seperti rudal hipersonik. Hal ini mencerminkan ketidakpercayaan mendalam yang menjadi landasan dari teori realisme, di mana setiap negara merasa perlu mempersiapkan diri terhadap kemungkinan konfrontasi (Keiko, 2023)

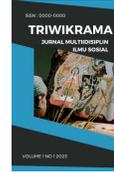
Dari perspektif ekonomi, rivalitas ini tercermin dalam perang dagang yang telah menghambat hubungan ekonomi kedua negara. Kebijakan tarif dan pembatasan perdagangan yang diterapkan oleh masing-masing negara menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan atau merusak posisi lawan. Selain itu, pengembangan teknologi dan perlombaan untuk dominasi di sektor teknologi tinggi, seperti jaringan 5G dan kecerdasan buatan, menunjukkan bagaimana inovasi dan kemajuan teknologi dipandang sebagai komponen penting dalam keseimbangan kekuatan global. (Keiko, 2023)

Terakhir, dari aspek politik dan diplomatik, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga terlihat dalam berbagai forum internasional. Amerika Serikat kerap menekan negara-negara aliansinya untuk mengadopsi kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Tiongkok, seperti blokade terhadap perusahaan teknologi Huawei. Tiongkok, di sisi lain, berusaha memperluas pengaruhnya melalui lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional lainnya. Realisme membantu kita memahami bahwa di balik setiap langkah diplomatik ada upaya untuk menciptakan atau mengikis struktur kekuasaan yang ada demi keuntungan nasional. Dengan demikian, teori realisme menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika kompleks dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. (Keiko, 2023)

2. Strategi Australia dalam Rivalitas Hegemoni Amerika Serikat dan China

Australia mengembangkan berbagai strategi untuk mengelola rivalitas antara Amerika Serikat dan China. Salah satu strategi utama adalah diversifikasi aliansi dan kemitraan strategis. Dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik seperti Jepang, India, dan negara-negara ASEAN, Australia mencoba mengurangi ketergantungannya pada dominasi salah satu kekuatan besar. Upaya ini terlihat dari partisipasi aktif Australia dalam *Quad (Quadrilateral Security Dialogue)* yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, dan India. (Pangestu, 2021).

Dalam mengelola hubungan dengan kedua negara besar, Australia menerapkan pendekatan pragmatis yang memprioritaskan keamanan dan kepentingan nasional. Di sisi keamanan, Australia sangat bergantung pada payung pertahanan Amerika Serikat dan berpartisipasi dalam berbagai latihan militer bersama. AUKUS adalah contoh nyata dari pendekatan ini, di mana peningkatan kapabilitas militer Australia melalui kapal selam bertenaga nuklir diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan China yang terus meningkat. Namun, di sisi ekonomi, Australia menyadari pentingnya China sebagai mitra dagang utama. China adalah



tujuan utama ekspor komoditas seperti bijih besi, batu bara, dan gas alam cair dari Australia. Untuk itu, Australia tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan perdagangan dengan China tanpa mengorbankan kepentingan ekonominya. Oleh karena itu, Australia berusaha menjaga hubungan baik dengan China sambil tetap waspada terhadap potensi ancaman dan ketidakpastian yang mungkin timbul dari kebijakan luar negeri yang agresif. (Pangestu, 2021).

Tambahan lagi, Australia melibatkan dirinya dalam inisiatif diplomatik yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Melalui keanggotaannya di *forum-forum* multilateral seperti ASEAN, *East Asia Summit* (EAS), dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), Australia mencoba mempromosikan aturan-aturan dan normatif yang mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan. Strategi lainnya adalah investasi dalam teknologi dan kapabilitas intelijen untuk memperkuat keamanan nasional dan daya tawar dalam diplomasi internasional. Dengan memperkuat sektor-sektor ini, Australia berupaya meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman serta memiliki fleksibilitas lebih dalam menyikapi perkembangan situasi geopolitik. Secara umum, strategi Australia adalah berusaha menjalankan kebijakan luar negerinya secara mandiri dengan tetap mengelola pengaruh atau intervensi yang mungkin datang dari dua kekuatan besar ini. Negara ini menerapkan kebijakan luar negeri yang multifaset guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan China dan keamanan dengan Amerika Serikat. (Pangestu, 2021).

3. Peran *Balance of Power* dalam Kebijakan Australia

Balance of power atau keseimbangan kekuatan merupakan konsep yang esensial dalam kebijakan luar negeri Australia dalam menghadapi rivalitas hegemoni antara Amerika Serikat dan China. Dengan adopsi pendekatan *balance of power*, Australia berupaya mencegah dominasi satu negara atas lainnya di kawasan Indo-Pasifik. (Purwoko, 2020)

Pertama, pendekatan *balance of power* memungkinkan Australia untuk menyeimbangkan dukungan konstelasi negara-negara lain dalam kawasan. Dengan menggalang kemitraan dengan negara-negara seperti Jepang, India, dan negara-negara ASEAN, Australia dapat memperkuat pengaruh kolektif yang mencegah kekuatan dominan tunggal. Kedua, Australia menyeimbangkan keterlibatannya dalam aliansi keamanan dan kemitraan ekonomi. Di satu sisi, kemitraan AUKUS dengan Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan komitmen Australia terhadap keamanan kolektif dan stabilitas regional yang dikaitkan dengan kekuatan militer Amerika Serikat. Di sisi lain, Australia tetap membuka pintu ekonomi dan hubungan perdagangan dengan China, menjaga kepentingannya dalam perekonomian global. (Pangestu, 2021).

Ketiga, kemampuan Australia untuk mengadaptasi kebijakannya berdasarkan dinamika terbaru menjadi krusial dalam menjalankan *balance of power*. Negara ini mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dan memodernisasi militernya guna mengimbangi peningkatan kapabilitas militer China. Keempat, Australia melibatkan diri dalam diplomasi preventif sebagai bagian dari *balance of power*. Dengan berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional dan multilateral, Australia secara strategis mengadvokasi norma internasional dan hukum laut yang sering menjadi titik konflik utama antara berbagai

kepentingan di Indo-Pasifik. Kelima, pentingnya membangun kapabilitas domestik tidak bisa diabaikan. Dengan memperkuat ketahanan ekonomi, teknologi, dan inovasi, Australia akan lebih mampu untuk menegosiasikan posisi lebih kuat dalam percaturan geopolitik dan ekopolitik global. (Purwoko, 2020)

Melalui pandangan realis, *balance of power* menjadi landasan bagi Australia dalam mengelola rivalitas dan mempertahankan kebijakan luar negeri yang realistis dan pragmatis. Ketahanan domestik dan kemitraan strategis menjadi dua pilar utama yang menopang tindakan-tindakan Australia dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang di kawasan Indo-Pasifik. (Purwoko, 2020)

4. Strategi Australia dalam Rivalitas Hegemoni

Australia, sebagai negara yang terletak di posisi strategis Indo-Pasifik, terjebak dalam rivalitas antara dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan China. Ketegangan yang terjadi antara kedua negara ini tidak hanya berpusat pada kekuatan militer, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, diplomatik, dan teknologi. Dalam menghadapi tekanan dari kedua belah pihak, pendekatan realisme dan konsep *balance of power* menjadi panduan yang relevan bagi kebijakan luar negeri Australia. Negara ini kemudian menerapkan berbagai strategi multifaset yang dirancang untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan serta keamanan dan stabilitas regional (Natal S, 2023).

a. *Diversifikasi* Aliansi dan Kemitraan

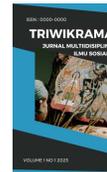
Untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu besar pada satu kekuatan, Australia memperkuat hubungannya dengan negara-negara di kawasan seperti Jepang, India, dan ASEAN. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui perjanjian Quad, yang melibatkan kolaborasi dalam berbagai inisiatif keamanan dan ekonomi. Dengan memperbanyak mitra aliansi, Australia berharap dapat menciptakan keseimbangan yang lebih proporsional dalam hubungan internasionalnya. *Diversifikasi* ini juga memungkinkan Australia untuk memiliki lebih banyak opsi dalam menanggapi tekanan eksternal, baik dari Amerika Serikat maupun China, sehingga memperkuat posisi tawarnya di antara dua kekuatan besar tersebut.

b. Perkuatan Kapabilitas Militer

Australia juga berusaha meningkatkan kapabilitas militernya sebagai bagian dari strategi *deterrence*. Melalui aliansi AUKUS yang melibatkan Amerika Serikat dan Inggris, Australia meningkatkan anggaran pertahanannya untuk memperoleh teknologi dan peralatan militer canggih. Perkuatan kapabilitas militer ini bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap potensi ancaman dari China. Selain itu, dalam konteks aliansi dengan Amerika Serikat, langkah ini menunjukkan komitmen Australia terhadap stabilitas regional dan meningkatkan koordinasi militer dengan sekutu-sekutu strategisnya. Langkah perkuatan ini juga menunjukkan bahwa Australia serius dalam menjaga kepentingannya di kawasan Indo-Pasifik.

c. Diplomasi Ekonomi

Meskipun ada ketegangan diplomatik dengan China, Australia tetap menjaga hubungan perdagangan yang sehat dengan negara tersebut, mengingat besarnya ketergantungan



ekonomi bilateral, terutama dalam sektor sumber daya alam. Strategi diplomasi ekonomi ini mencakup upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan risiko politik. Australia berusaha untuk memfasilitasi perdagangan yang saling menguntungkan sambil tetap waspada terhadap potensi konflik yang dapat timbul. Dengan demikian, meskipun ada gesekan di bidang diplomatik, hubungan ekonomi yang erat tetap menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran ekonomi Australia.

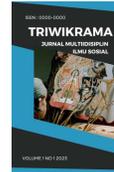
d. Keterlibatan dalam Forum Multilateral

Australia berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN, *East Asia Summit* (EAS), dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) untuk mempengaruhi kebijakan dan norma internasional yang mendukung keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Melalui keterlibatan dalam forum multilateral, Australia dapat memajukan kepentingan nasionalnya dan membentuk aturan internasional yang lebih proporsional. Partisipasi ini juga menciptakan platform bagi Australia untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan serta memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi regional.

e. Investasi dalam Teknologi dan Intelijen

Untuk meningkatkan keamanan nasional dan memperkuat posisi tawarnya dalam diplomasi internasional, Australia berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi serta memperkuat jaringan intelijennya. Investasi dalam teknologi tidak hanya berfokus pada kemampuan militer, tetapi juga pada keamanan siber dan inovasi yang dapat memberikan keuntungan strategis. Selain itu, penguatan jaringan intelijen memungkinkan Australia untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika global. Dengan demikian, investasi di bidang ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kapabilitas keseluruhan Australia dalam menghadapi tantangan global. (Al Syhrin, 2018)

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, Australia berupaya menjaga penyalarsan kepentingan antara kekuatan besar dunia sambil mempertahankan otonominya di dalam kawasan yang strategis. Pendekatan pragmatis ini adalah manifestasi dari prinsip realisme yang memahami hubungan internasional sebagai arena persaingan kekuatan yang memerlukan tindakan yang strategis dan kalkulatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional (Al Syhrin, 2018). Kontestasi hegemoni antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik telah menciptakan dilema strategis bagi Australia. Sebagai negara yang berada di tengah persaingan kekuatan besar ini, Australia harus menavigasi hubungan kompleks dengan kedua negara adidaya tersebut. Di satu sisi, Australia memiliki aliansi keamanan yang kuat dengan Amerika Serikat melalui ANZUS (*Australia, New Zealand, United States Security Treaty*). Di sisi lain, China merupakan mitra dagang terbesar Australia, memberikan tekanan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, posisi Australia menjadi semakin rumit dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan dan ekonominya. (Ashari, 2020)

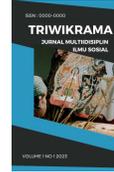


Sejak Perang Dunia II, Australia telah memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat, terutama dalam hal keamanan dan militer. Aliansi ini semakin diperkuat setelah Perang Dingin ketika ancaman dari *Soviet* dan kemudian dari berbagai konflik di Asia Timur mendorong kerja sama lebih lanjut. Sementara itu, hubungan ekonomi Australia dengan China mengalami kemajuan pesat sejak akhir abad ke-20, setelah China melaksanakan reformasi ekonomi. Australia menjadi salah satu sumber utama bahan baku untuk mendukung pertumbuhan ekonomi China, yang menciptakan ketergantungan ekonomi yang signifikan. (Ashari, 2020)

Ketergantungan ekonomi ini membawa dilema, terutama ketika ketegangan politik antara China dan Amerika Serikat mulai meningkat. Pada aspek ekonomi, Australia mendapat manfaat besar dari perdagangan dengan China, termasuk ekspor komoditas seperti batu bara, bijih besi, dan gas alam. Namun, di sisi keamanan, Australia harus memperhatikan komitmennya terhadap aliansi dengan Amerika Serikat, terutama dalam menghadapi ancaman *regional* seperti dari Korea Utara dan ekspansi militer China di Laut Cina Selatan. Australia sering kali menemukan dirinya dalam posisi sulit ketika harus membuat keputusan yang mungkin menyinggung salah satu dari dua kekuatan besar ini. Misalnya, dalam isu Laut Cina Selatan, Australia telah menyatakan dukungan terhadap kebebasan navigasi bersama Amerika Serikat, yang disambut dengan kritik keras dari China. Demikian pula, upaya untuk menarik investasi China ke infrastruktur Australia harus diimbangi dengan kekhawatiran tentang keamanan nasional dan pengaruh asing. (Sarah, 2022).

Dilema ini juga berpengaruh pada politik domestik Australia. Pemerintah harus tetap tanggap terhadap aspirasi nasional sambil mengelola ketegangan dalam tatanan internasional yang berubah. Ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Indo-Pasifik lainnya, seperti Jepang dan India, sebagai bagian dari strategi Quad (Quadrilateral Security Dialogue) untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. (Ashari, 2020).

Sebagai respons terhadap dilema ini, Australia mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih fleksibel dan adaptif. Strategi ini dikenal sebagai "*Pacific Step-up*," yang bertujuan untuk memperkuat hubungan Australia dengan negara-negara kepulauan Pasifik melalui bantuan pembangunan, kerjasama ekonomi, dan pertahanan. Australia juga terus berpartisipasi dalam forum multilateral seperti ASEAN untuk memperkuat keterlibatannya di kawasan Indo-Pasifik. Kontestasi hegemoni antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik memang menempatkan Australia dalam posisi yang penuh dilema. Dalam upayanya menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak, Australia perlu terus menyelaraskan kebijakan luar negerinya secara hati-hati untuk menghindari potensi konflik yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. Kemampuan untuk menavigasi dilema ini akan sangat menentukan peran Australia di kancah internasional dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Dengan demikian, dilema Australia dalam kontestasi hegemoni antara Amerika Serikat dan China mencerminkan kompleksitas geopolitik modern yang menuntut kebijakan luar negeri yang cermat dan bijaksana (Indrawan, 2022).



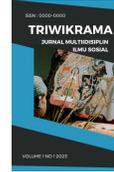
KESIMPULAN

Kontestasi hegemoni antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik, dalam perspektif realisme, mencerminkan rivalitas kekuatan besar dalam memperjuangkan dominasi regional. Amerika Serikat, sebagai hegemon tradisional, memanfaatkan kekuatan militernya dan aliansi strategis seperti AUKUS, sementara China berupaya menentang dominasi tersebut melalui modernisasi militer dan inisiatif ekonomi *Belt and Road Initiative* (BRI). Rivalitas ini menciptakan dinamika politik yang kompleks, dengan kawasan Indo-Pasifik menjadi pusat persaingan kekuatan. Dalam konteks ini, teori realisme memandang hubungan internasional sebagai perjuangan untuk kekuasaan, di mana negara-negara harus bertindak rasional demi mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya di bawah kondisi anarki internasional. Konsep *balance of power* menjadi instrumen penting dalam memahami bagaimana negara-negara, termasuk Australia, berusaha menyeimbangkan kekuatan untuk mencegah dominasi hegemoni tunggal.

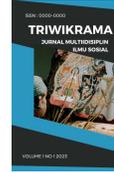
Sebagai negara yang berada di antara dua kekuatan besar, Australia menghadapi dilema strategis dalam menjaga keseimbangan antara keamanan yang didukung oleh aliansi dengan Amerika Serikat dan kepentingan ekonominya dengan China sebagai mitra dagang utama. Untuk merespons situasi ini, Australia mengadopsi strategi multifaset yang mencakup diversifikasi aliansi melalui Quad, penguatan kapabilitas militer melalui kemitraan AUKUS, diplomasi ekonomi untuk menjaga hubungan perdagangan dengan China, serta partisipasi aktif dalam forum multilateral seperti ASEAN dan APEC. Pendekatan ini menunjukkan pragmatisme Australia dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks, di mana kemampuan beradaptasi terhadap perubahan keseimbangan kekuatan menjadi krusial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip realisme dan strategi *balance of power*, Australia berupaya mempertahankan stabilitas regional sekaligus melindungi kepentingan nasionalnya di tengah persaingan hegemoni Amerika Serikat dan China.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syhrin. (2018). China versus Amerika Serikat: Interpretasi rivalitas keamanan negara adidaya di kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Global Dan Strategis*, 12(1), 145-160.
- Ashari. (2020). ANALISIS BALANCE OF THREAT DARI PENGARUH POLITIK INTERNASIONAL CINA DI INDO-PASIFIK: TINJAUAN TEORI REALISME. *Spektrum*, 20(02), 87-103.
- Australia Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Nuclear Weapons | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*. Department of Foreign Affairs and Trade. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/non-proliferation-disarmament-arms-control/nuclear-weapons>
- Bhisa, N. A., Seba, R. O. C., & Simanjuntak, T. R. (2024). Kebijakan Luar Negeri AS Di Masa Kepemimpinan Joe Biden Melalui The Quad 2.0 Sebagai Pencegahan Dominasi China Di Kawasan Indo-Pasifik 2022-2023. *Jurnal Niara*, 17(01), 106-116.



- Indrawan. (2022). Kondisi Konflik di Indo-Pasifik: Memahami Akar Masalah dari Aukus hingga Manuver China. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 12(1), 124-145.
- Indrawan, J. (2022). KONDISI KONFLIK DI INDO-PASIFIK: MEMAHAMI AKAR MASALAH DARI AUKUS HINGGA MANUVER CHINA. *Jurnal Review Politik*, 12(1), 134 – 145.
- Interesse, G., & Yi Wu. (2024, 10 29). *Hubungan Ekonomi Tiongkok-Australia: Perdagangan, Investasi, dan Informasi Terbaru*. China Briefing. [https://www-china--briefing-com.translate.google/news/china-australia-bilateral-ties-opportunities-challenges-latest-updates/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Tiongkok%20dan%20Australia%20memiliki%20hubungan,BISNIS%20DAN%20INVESTASI%](https://www-china--briefing-com.translate.google/news/china-australia-bilateral-ties-opportunities-challenges-latest-updates/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Tiongkok%20dan%20Australia%20memiliki%20hubungan,BISNIS%20DAN%20INVESTASI%20)
- Keiko. (2023). Examining Indonesia's Strategic Role, Position, and Interest in Indo-Pacific. *Airlangga University Press*.
- Namok, B. (n.d.). *About Australia | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*. Department of Foreign Affairs and Trade. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.dfat.gov.au/about-australia>
- Natal S. (2023). Bangsasuku. *Hukum Islam Dan Ketahanan Nasional*, 103.
- Pangestu. (2021). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 26(1), 1-22.
- Purwoko. (2020). The Material of Wawasan Nusantara as Indonesian Geopolitic Note and the Implementation in Islamic State University. *At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, 14(1), 80-95.
- Putri, V. K. M. (2024, April 12). *Sumber Sekunder: Pengertian dan Contohnya*. KOMPAS.com. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.kompas.com/skola/read/2024/04/12/080000469/sumber-sekunder--pengertian-dan-contohnya>
- Roren, P. (2024, Mei 26). *Opinion-Why Unipolarity Is Not Over*. E-INTERNATIONAL RELATIONS. <https://www.e-ir.info/2024/05/26/opinion-why-unipolarity-is-not-over/>
- Sarah. (2022). Strategi Balance of Power Indonesia Dalam "Perang Dingin" Antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. *Defendonesia*, 6(01), 48-57.
- Sesariato. (2023). Mendayung (Memanipulasi Wacana) di Antara Dua Karang: Discursive hedging Indonesia dalam Indo-Pasifik. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(1), 55-67.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2024, 11 17). *Cold War*. britannica-com. <https://www-britannica-com.translate.google/event/Cold-War>
- U.S Department of state. (2023, July 27). *The United States-Australia Relationship - United States Department of State*. State Department. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.state.gov/the-united-states-australia-relationship/>



- Vientiane. (2024, 10 11). *Wapres K.H. Ma'ruf Amin: ASEAN Harus Ambil Peran Kunci di Wilayah Indo-Pasifik*. wapresri.go.id. <https://www.wapresri.go.id/wapres-k-h-maruf-amin-asean-harus-ambil-peran-kunci-di-wilayah-indo-pasifik/#:~:text=Vientiane%2C%20wapresri.go.id,memiliki%20pertumbuhan%20ekonomi%20cukup%20pesat.>
- Wibisono, A. (2019, Maret 6). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-penelitian-kualitatif>
- Winata, N. M. A. L., Aftah, ., C., & Wirawan, R. (2021). Strategi Australia Mengakomodir Politik Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Australian White Paper 2017. *Interdependence: Journal of International Studies*, 2(2), 88-95.